



Pendampingan Persiapan Akreditasi Pos PAUD Al-Hayyu Desa Banjar Bendo Kecamatan Sidoarjo

Septi Budi Sartika ✉, Nova Firda Alsya

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Jl. Mojopahit No.666 B, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, Jawa Timur 61215, Indonesia

| septibudi1@umsida.ac.id ✉ | DOI : <https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i4.1847> |

Abstrak

Akreditasi lembaga merupakan kegiatan untuk menjaga mutu lembaga itu sendiri, apakah telah sesuai dengan standar nasional atau belum. Bukanlah perkara mudah untuk mempersiapkan akreditasi lembaga. Pos PAUD merupakan lembaga PAUD non-formal yang dikelola oleh desa. Kebanyakan Pos PAUD belum terakreditasi, tentu hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dan juga mengakibatkan beberapa faktor lainnya. Pendampingan akreditasi untuk lembaga mutlak diperlukan dalam rangka menyiapkan dokumen pendukungnya. Metode kegiatan meliputi 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan pendampingan ini meliputi 3, yaitu 1) seminar tips sukses menyiapkan akreditasi PAUD, 2) penelusuran dokumen pendukung, dan 3) pengadministrasian dokumen pendukung 8 standar akreditasi. Hasil kegiatan pendampingan sebagai berikut: 1) Pos PAUD Al-Hayyu telah mengetahui persiapan akreditasi melalui seminar yang telah dilakukan, 2) Pos PAUD Al-Hayyu telah didampingi dalam menelusuri dokumen lampau untuk mendukung akreditasi, dan 3) Pos PAUD Al-Hayyu telah mempunyai arsip 8 standar akreditasi di google drive, sewaktu-waktu apabila persyaratan akreditasi telah terpenuhi maka dapat segera melakukan pengusulan akreditasi kepada BAN PAUD & PNF Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Pendampingan, Akreditasi, Pos PAUD



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Akreditasi belakang ini banyak diperbincangkan bagi para pendidik baik dalam forum resmi maupun non-formal (Nuryanto & Irmade, 2019). Isu akreditasi ternyata membuat para pendidik kaget dan takut dengan persiapannya yang menyita waktu, tenaga, dan biaya (Ismaya *et al.*, 2021). Alasan ketakutannya karena akreditasi adalah hal yang sangat menentukan mutu atau kualitas lembaganya, sehingga harus kerja keras untuk mempersiapkan berkas atau dokumen yang jumlahnya tidak sedikit dalam rentan 2 tahun terakhir. Adanya Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), surat izin operasional lembaga, surat pertanggungjawaban mutlak pengusulan akreditasi, serta sarana dan prasarana harus dilengkapi sebagai persyaratan awal akreditasi (Damanik, 2017). Setiap lembaga pendidikan sebaiknya terakreditasi, supaya jelas standar pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Hal ini tidak hanya berlaku di pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi namun juga berlaku di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Lembaga PAUD termasuk satuan pendidikan yang terkena kebijakan untuk segera melakukan akreditasi (Najamuddin *et al.*, 2022). Tingkatan PAUD dimulai dari Taman Pengasuhan Anak (TPA) usia 0-2 tahun, Kelompok Bermain (KB) usia 2-4 tahun,

dan Taman Kanak-Kanak (TK) usia 4-6 tahun (Fibriani, 2019). Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mencantumkan Pendidikan Non-Formal sebagai salah satu jalur pendidikan dan diperlukan setara dengan Pendidikan Formal. Hal tersebut mempunyai konsekuensi pemberlakuan penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF), sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan ke dua dari PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59 Tahun 2012 tentang BAN PAUD dan PNF. Akreditasi PAUD yang akan difokuskan pada PAUD non-formal.

Akreditasi PAUD adalah sebuah upaya penilaian dari pemerintah untuk mengukur kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Akbar *et al.*, 2020). Hal ini dilakukan sebagai upaya penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan oleh Pemerintah. Pengajuan akreditasi mewajibkan satuan PAUD untuk mengisi Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) yang ada dalam Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) serta melengkapi data satuan Dapodik (Daryati, 2021). Satuan PAUD sebaiknya membuat dan mengunggah surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang telah diajukan melalui Sispena. Data dan dokumen yang diperlukan dalam persiapan akreditasi PAUD sebagai berikut: (1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian (Damayanti, 2019).

Pos PAUD menurut Moedzakir (2010) merupakan salah satu program pendidikan luar sekolah. Pentingnya pendidikan pada anak usia dini tidak dapat dilepaskan dari masa keemasan perkembangan anak yang membutuhkan stimulasi-stimulasi positif guna menunjang perkembangan anak secara keseluruhan yang mencakup nilai agama dan moral, fisik dan motorik, emosional, bahasa dan seni (Makleat *et al.*, 2021). Lembaga PAUD diharapkan mampu memberikan stimulasi yang tepat dalam setiap aktifitas belajar dan bermain anak sehingga anak mampu tumbuh dan berkembang secara optimal (Khazanah *et al.*, 2011). Akreditasi ini dilakukan guna menstandarkan layanan pendidikan secara nasional yang terindikasi melalui tingkatan yaitu A, B, C, dan Tidak Terakreditasi. Hal ini dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan PAUD khususnya di Indonesia.

Upaya peningkatan kualitas PAUD bukanlah perkara yang mudah (Zoghara, *et al.*, 2021). Pendapat Aminah & Amiliya (2021), sekolah IT Al Madinah belum siap menghadapi akreditasi BAN PAUD/PNF karena dokumen administrasi tidak lengkapnya. Menurut (Najamuddin *et al.*, 2022) pengelola merasa terbantu dan termotivasi untuk mengajukan akreditasi meskipun belum sepenuhnya paham akan instrument yang berada di Sispena. Dengan memperhatikan hasil penelitian, bahwa ketidaksiapan akreditasi umumnya karena dokumen administrasi yang tidak lengkap dan membutuhkan pendampingan, yang membantu sekaligus memotivasi lembaga untuk akreditasi.

Hasil observasi awal di lokasi sasaran kegiatan, ada permasalahan yang dihadapi lembaga Pos PAUD Al Hayyu Desa Banjar Bendo dalam meningkatkan kualitas pendidikan, diantaranya (1) kurangnya tenaga pendidik yang berlatar belakang PAUD atau pendidikan umum, (2) kurangnya pengetahuan tentang teknologi informasi oleh pendidik, (3) lembaga PAUD masih belum siap melakukan akreditasi karena

membutuhkan persiapan yang cukup untuk melengkapi dokumen dan jumlah peserta didik minimal 10, karena Pos PAUD merupakan lembaga PAUD non-formal di mana tenaga pendidik dan peserta didik dari kader poyandu desa. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan kegiatan pendampingan dalam upaya mempersiapkan akreditasi di lembaga Pos PAUD Al-Hayyu Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Solusi permasalahan yang ditawarkan sebagai bentuk respon terhadap permasalahan di atas adalah 1) adanya seminar akreditasi, 2) memberikan teknis dalam pengadministrasikan dokumen yang akan diunggah di sispena BAN PAUD & PNF, dan 3) penelusuran dokumen-dokumen dan manajemen administrasi dokumen-dokumen pendukung pada tiap-tiap standar akreditasi PAUD sehingga lembaga Pos PAUD siap untuk mengajukan akreditasi melalui sispena BAN PAUD & PNF.

2. Metode

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur khususnya di lembaga Pos PAUD Al-Hayyu yang belum terakreditasi. Objek dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah seluruh warga di lembaga PAUD di Kecamatan Sidoarjo, yang meliputi lingkungan sekitar Pos PAUD dan para pelakunya termasuk guru, peserta didik, dan orang tua melalui paguyuban wali murid. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan mulai 28 Januari sampai dengan 6 Maret 2022 di lembaga Pos PAUD Al Hayyu Desa Banjar Bendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi 3, yaitu Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (Riduwan, 2016). Tahap perencanaan terdiri atas: melakukan perizinan kegiatan oleh pihak terkait yaitu kepala desa dan kepala lembaga PAUD, menggali data awal melalui proses wawancara dan dokumentasi, serta mempersiapkan catatan untuk melakukan pendampingan. Pada tahap pelaksanaan yaitu kegiatan pendampingan dilakukan dengan mendatangkan narasumber yaitu dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) Prodi Pendidikan Guru PAUD, serta praktisi di lingkungan BAN PAUD dan PNF Jawa Timur, memberikan teknis pengadministrasian dokumen yang akan diunggah di sispena, melakukan penelusuran dokumen-dokumen pendukung akreditasi satu tahun sebelumnya dan tahun yang akan berjalan, dan melakukan pengadministrasikan dokumen-dokumen ke dalam 8 standar akreditasi PAUD. Dengan demikian kegiatan pendampingan dapat dengan mudah memahami dan mengimplementasikannya dalam mengajukan akreditasi PAUD. Tahap pelaporan, berisi monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan akreditasi dengan aplikasi Sispena, sehingga apabila ada pembukaan akreditasi, lembaga PAUD langsung dapat mengajukan usulan akreditasi melalui sispena BAN PAUD & PNF.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

3.1. Seminar Persiapan Akreditasi

Kegiatan seminar akreditasi dilakukan pada tanggal 7 Februari 2022 mulai jam 9.00 s.d 12.00 WIB di balai desa Banjar Bendo seperti ditunjukkan pada **Gambar 1**. Kegiatan ini dihadiri oleh pendidik dan Kepala Lembaga Pos PAUD Al-Hayyu serta mengundang pendidik dari Pos PAUD di desa sekitarnya, dengan jumlah kurang lebih 15 peserta. Narasumber kegiatan ialah dosen Pendidikan Guru PAUD, UMSIDA dan sebagai praktisi di BAN PAUD dan PNF Jawa Timur. Kegiatan ini meliputi: pembukaan, penyampaian materi tips sukses dalam persiapan akreditasi PAUD, diskusi dan tanya jawab, serta penutup.



Gambar 1. Kegiatan Seminar Akreditasi

Pada kegiatan pembukaan, terbagi menjadi pembacaan ayat Al Qur'an, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sambutan-sambutan sekaligus pembukaan kegiatan seminar. Kegiatan pembukaan ini dilakukan untuk menjelaskan tujuan dan maksud dilakukannya kegiatan serta manfaat yang akan diperoleh setelah dilakukan seminar.

Pada kegiatan inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Materi meliputi seputar pentingnya akreditasi bagi PAUD serta korelasi isu tentang pembiayaan Badan Operasional Pendidikan (BOP) kepada lembaga PAUD dan akreditasi lembaga, di mana pembiayaan BOP oleh pemerintah akan distop apabila lembaga tidak melakukan akreditasi. Selain itu, ada penyampaian 8 standar akreditasi PAUD, meliputi (1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian (Damayanti, 2019).

Persiapan akreditasi, dimulai dengan pengajuan syarat akreditasi dan penyiapan dokumen akreditasi dari 8 standar. Alur akreditasi yang tidak hanya asemen lapangan atau dikenal dengan visitasi, namun juga kelengkapan Persyaratan Pengajuan Akreditasi (PPA). Setelah PPA dinyatakan layak, maka lembaga PAUD akan dikunjungi

oleh asesor visitasi. Asesor visitasi inilah yang akan merekam kegiatan riil di lembaga, asesor visitasi memberikan penilaian yang bukan sebagai nilai akhir, karena ada asesor validasi yang akan menimbang kembali hasil penilaian asesor visitasi. Melalui sidang pleno nilai akreditasi lembaga diputuskan. Proses dan tahapan yang panjang ini akan menjadi pembelajaran untuk pembenahan dan peningkatan layanan lembaga PAUD.

Kegiatan penyampaian materi dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini yang memunculkan antusias peserta dalam bertanya langsung dengan narasumber. Pertanyaan di antaranya, cara meminimalisir kendala-kendala seperti dokumen-dokumen tidak tersimpan dengan baik, laptop/ handphone rusak sehingga dokumen hilang, kurangnya tenaga operator sekolah, kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan komputer/ laptop untuk mengarsip dokumen. Rata-rata semua ingin segera terakreditasi lembaga nya, namun kendala-kendala tersebut yang harus segera tersolusikan.

Pada kegiatan penutup, ada simpulan dari materi yang telah disampaikan, doa penutup dan motivasi semangat untuk terus berkarya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui standar mutu pendidikan nasional yaitu akreditasi lembaga.

3.2. Penelusuran Dokumen Akreditasi

Dokumen-dokumen yang bersifat lampau ini perlu ditelusuri keberadaannya, apabila tidak ada ya dibuat dan dilaksanakan. Sehingga apabila ditanyakan oleh asesor bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya sekedar dokumen hitam di atas putih, namun memang betul-betul dilaksanakan dengan baik. Dokumen-dokumen 8 standar Pos PAUD Al-Hayyu meliputi:

a. Standar Pencapaian Perkembangan Anak

Pos PAUD Al-Hayyu merupakan PAUD non-formal yang melayani usia KB yaitu 3-4 tahun. Pencapaian perkembangan anak telah dilakukan sesuai standar, hanya saja dokumen bukti masih dilakukan penelusuran lebih lanjut.

b. Standar Isi

Pos PAUD Al-Hayyu telah memiliki dokumen KTSP yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

c. Standar Proses

Pos PAUD Al-Hayyu telah melakukan pendokumentasian dokumen RPPH, RPPM, Prota dan Prosem. Kegiatan yang dilakukan tinggal merapikan dan mengambil bukti video pembelajaran di tahun berjalan sesuai dengan indikator pencapaian perkembangan anak.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Pos PAUD Al-Hayyu mempunyai 2 pendidik dan 1 kepala lembaga. Tenaga pendidik dan kependidikan lulusan SMA dan telah mengikuti kegiatan pelatihan PAUD secara periodik.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Pos PAUD Al-Hayyu belum memiliki bangunan sendiri, karena gedung sekolah yang digunakan merupakan milik desa Banjar Bendo. Dalam gedung lembaga Pos PAUD Al-Hayyu terdapat 2 ruangan yaitu ruangan belajar dan ruangan guru dan kepala lembaga. Fasilitas umum menyatu dengan balai desa Banjar Bendo seperti tempat bermain, toilet, serta tempat cuci tangan. Pos PAUD juga mempunyai Alat Peraga Edukasi (APE) berbagai aspek perkembangan anak, mulai dari APE Nilai Agama dan Moral, APE Motorik Halus, APE Kognitif, APE Bahasa dan Seni, dan APE Motorik Kasar. Sarana dan prasarana ini terdokumentasi dalam inventaris lembaga.

f. Standar Pengelolaan

Pos PAUD Al-Hayyu telah melakukan pengelolaan meliputi perencanaan kegiatan lembaga, struktur organisasi serta tugas pokoknya, dan supervisi. Hanya saja dokumen yang dibuat belum sesuai dengan standar, sehingga dokumen-dokumen tersebut memerlukan perbaikan sesuai standar berlaku.

g. Standar Pembiayaan

Pos PAUD Al-Hayyu melakukan pencatatan manual dalam buku kas, membutuhkan pencatatan komputersisasi supaya data lebih akurat dan kredibel.

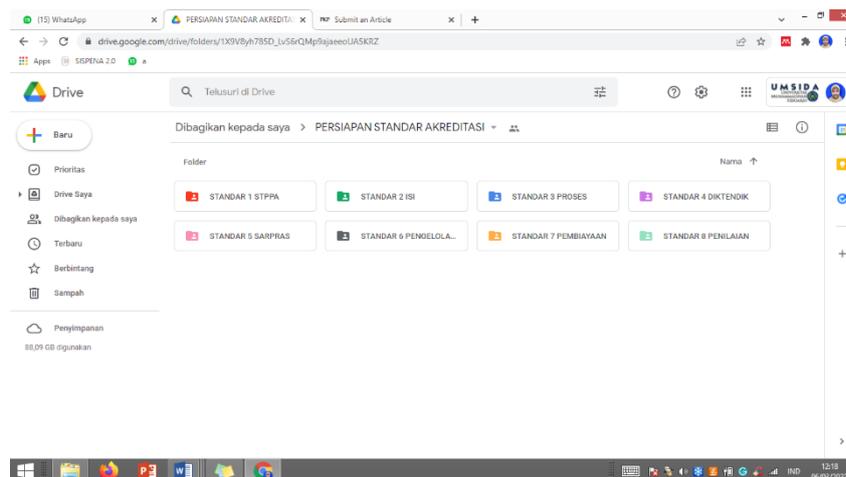
h. Standar Penilaian

Pos PAUD Al-Hayyu telah melakukan penilaian baik setiap kali pembelajaran, seminggu sekali, maupun penilaian rapor dalam 1 semester. Pencatatan ini dilakukan secara manual belum melakukan komputer.

Dokumen-dokumen yang masih belum ada namun telah dilakukan telah dilengkapi dan sesuai dengan 8 standar akreditasi PAUD melalui kegiatan pendampingan. Dengan demikian lembaga PAUD siap untuk mengusulkan akreditasi apabila dibuka pengajuan akreditasi melalui Sispena.

3.3. Pendokumentasian Dokumen-dokumen ke dalam 8 Standar Akreditasi

Setelah melakukan penelusuran dokumen-dokumen pendukung, selanjutnya melakukan dokumentasi kegiatan ke dalam 8 standar akreditasi. Tujuan dari kegiatan ini ialah membantu guru mengadministrasikan dokumen-dokumen pendukung akreditasi yang dimiliki oleh lembaga Pos PAUD Al-Hayyu Desa Banjar Bendo. Dokumen yang diarsip berupa *soft file* yang akan memudahkan guru untuk mengakses maka diberikan *Google Drive* seperti ditampilkan pada [Gambar 2](#).



Gambar 2. *Google Drive* Dokumen Pendukung 8 Standar Akreditasi PAUD

Berdasarkan [Gambar 2](#) dapat dinyatakan bahwa dokumen pendukung akreditasi Pos PAUD Al-Hayyu sudah lengkap mulai standar 1 s.d 8. Namun, dokumen-dokumen tersebut akan dilakukan peninjauan ulang kembali karena ada syarat yang kurang memenuhi dari jumlah siswa. Jumlah siswa di Pos PAUD Al-Hayyu hanya 6 anak.

Aturan akreditasi minimal jumlah anak ialah 10, baru bisa dikatakan memenuhi standar. Dengan demikian membutuhkan usaha yang cukup besar dalam menambah jumlah peserta didik di tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala lembaga, 1) orang tua ragu untuk menyekolahkan putra putrinya karena masih usia 3-4 tahun, 2) selain itu Pos PAUD Al-Hayyu termasuk PAUD non-formal, sehingga kebanyakan memilih untuk mengasuh anaknya sendiri sampai usia TK baru disekolahkan, 3) orang tua lebih memilih untuk menyekolahkan di TK atau lembaga formal. Untuk itu diperlukan sosialisasi baik melalui kegiatan PKK atau kegiatan desa yang lainnya untuk mengenalkan pentingnya PAUD untuk anak-anak di masa keemasannya.

Melalui kegiatan pendampingan akreditasi ini, lembaga Pos PAUD termotivasi untuk menyukseskan program akreditasi, yang menjadi kewajiban setiap lembaga baik formal maupun non-formal. Kegiatan pendampingan ini dapat dilakukan untuk Pos PAUD yang lainnya yang didirikan di Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2008, kurang lebih ada 20 Pos PAUD di bawah naungan desa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 1) Pos PAUD Al-Hayyu telah mengetahui persiapan akreditasi melalui seminar yang telah dilakukan, 2) Pos PAUD Al-Hayyu telah didampingi dalam menelusuri dokumen lampau untuk mendukung akreditasi, dan 3) Pos PAUD Al-Hayyu telah mempunyai arsip 8 standar akreditasi di *google drive*, sewaktu-waktu apabila persyaratan akreditasi telah terpenuhi maka dapat segera melakukan pengusulan akreditasi kepada BAN PAUD & PNF Provinsi Jawa Timur. Kegiatan pendampingan ini membutuhkan waktu yang relatif lama karena membutuhkan semangat dan keberanian untuk dapat mengusulkan akreditasi lembaga. Pendampingan selanjutnya dapat dilanjutkan dengan pendampingan promosi Pos PAUD supaya dapat memperoleh jumlah peserta didik sesuai standar minimal secara nasional.

Acknowledgement

Pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Banjar Bendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Bunda Pos PAUD Al-Hayyu, teman-teman KKN Pencerahan Kelompok 26, serta semua pihak yang turut memberikan bantuan kepada kami sehingga artikel ini dapat terselesaikan.

Daftar Pustaka

- Akbar, M. F., Jaya, F. H., & Duwikola, R. (2020). Pendampingan Persiapan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Pada Taman Kanak-Kanak Tunas Cendekia Gedong Tataan Pesawaran Lampung. *In Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1, No. 1*, pp. 467-474).
- Aminah, S., & Amiliya, R. (2021). Analisis Kesiapan dan Kesulitan Lembaga PAUD dalam Menghadapi Akreditasi Melalui Pendampingan Akreditasi BAN PAUD di TK Islam Al-Madinah Kota Dumai. *Al-Abyadh*, 4(1), 1-15.

- Damanik, J. (2017). Keterkaitan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 10(2), 180-203.
- Damayanti, E. (2019). Konsep dasar butir instrumen penilaian akreditasi pendidikan Anak Usia Dini. *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(2), 134-138.
- Daryati, M. E. (2021). Bimbingan Teknologi Instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini. *Abdi Reksa*, 2(2), 60-71.
- Fibriani, F. (2019). Pusat Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Malang Dengan Tema Arsitektur Perilaku (Doctoral dissertation, ITN Malang).
- Ismaya, I., Sulaiman, F., Firdiani, D., AB, U. D. M., & Elihami, E. (2021). Pembinaan Lembaga PAUD Menuju Lembaga Terakreditasi di Kabupaten Enrekang. *Maspul Journal Of Community Empowerment*, 3(2), 1-9.
- Khasanah, I., Prasetyo, A., & Rakhmawati, E. (2011). Permainan Tradisional Sebagai Media Stimulasi Aspek Perkembangan Anak Usia Dini. *PAUDIA: Jurnal Penelitian dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1).
- Makleat, N., Simbolon, G., Thomas, E. B., Selly, F. K., & Neonufa, S. (2021). Pendampingan Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 7(1), 83-87.
- Najamuddin, N., Sahrip, S., & Latif, A. (2022). Pendampingan Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Gugus Himpaudi Kecamatan Montong Gading Lombok Timur. *Jurnal Abdidias*, 3(1), 181-190.
- Nuryanto, S., & Irmade, O. (2019). Pendampingan Akreditasi Lembaga PAUD di IGTKI Wonosegoro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan (JPM-IKP)*, 2(02), 86-93.
- Riduwan, A. (2016). Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 3.
- Zoghara, D. A., Mandala, S., Syukur, A., & Selly, F. K. (2021). Pendampingan Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Kecamatan Nekamese. *Kelimumu Journal of Community Service*, 1(1), 56-60.